

Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Di SMP Negeri 230 Jakarta

Arlen Orlando Lukas
Manajemen Pendidikan, Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, Jakarta Timur
E-mail: arlenorlandolukas@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menginvestigasi transparansi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SMP Negeri 230 Jakarta, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana BOSP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan perencanaan dan pelaksanaan dana BOSP di SMP Negeri 230 Jakarta telah berjalan dengan baik, tercermin dari kesiapan sekolah dalam mengelola dana tersebut dan hasil evaluasi yang positif. Namun, masih diperlukan peningkatan dalam aspek pertanggungjawaban, terutama terkait dengan transparansi informasi mengenai alokasi dan penggunaan dana BOSP kepada semua pihak terkait. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi sekolah dan pihak terkait lainnya dalam meningkatkan transparansi pengelolaan dana BOSP di masa depan.

Kata Kunci: *Transparansi, Pengelolaan, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), SMP Negeri 230 Jakarta*

ABSTRACT

This research examines the transparency of the School Operational Assistance (BOSP) Fund management at SMP Negeri 230 Jakarta, about Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System. A qualitative methodology is employed to gain an in-depth understanding of the planning, implementation, and accountability processes of the BOSP fund. The findings indicate that the planning and implementation stages of the BOSP fund at SMP Negeri 230 Jakarta have been conducted effectively. This is evidenced by the school's readiness to manage the fund and positive evaluation results. Nevertheless, further enhancements are required in the accountability domain, particularly regarding the transparency of information regarding the allocation and utilization of the BOSP fund to all relevant parties. This research offers insights into enhancing BOSP fund management effectiveness in schools and other relevant stakeholders.

Keywords : *Transparency, Management, School Operational Assistance Fund (BOSP), SMP Negeri 230 Jakarta*

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah landasan utama yang

mengatur pendidikan di Indonesia. Undang-undang ini mencakup semua tingkatan pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga menengah (Inkriwang, 2020) . Sebagai payung

hukum, undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip dasar, standar, dan prosedur dalam penyelenggaraan pendidikan. Implementasi Undang-Undang ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh demi kemajuan bangsa dan negara.

Undang - Undang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan tujuan utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan ini meliputi usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang merata, berkualitas, dan sesuai dengan tuntutan zaman menjadi fokus dalam mencapai tujuan tersebut. Harapannya adalah agar pendidikan mampu menciptakan generasi yang unggul. Generasi tersebut diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan masa depan.

Dalam dunia pendidikan, implementasi dalam kebijakan pembiayaan diperlukan adanya dana yang dimanfaatkan demi kepentingan sekolah agar proses pembelajaran dapat dilakukan secara efektif (Hestina & Melinda, 2022). Kebutuhan dan tuntutan di dalam bidang pendidikan memaksa pemerintah untuk menyalurkan bantuan pada masyarakat, salah satunya adalah penyaluran dana BOSP demi keberlangsungan dari penyelenggaraan pendidikan yang bermutu (Apud, 2018).

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) adalah salah satu strategi kebijakan pemerintah untuk mendukung sistem pendidikan nasional (Rubiyati & Ismanto, 2020) . BOSP diberikan kepada satuan pendidikan sebagai sumber pendanaan tambahan untuk memfasilitasi berbagai kegiatan pendidikan. Penggunaan dana BOSP

meliputi pembelian buku, alat tulis, pembayaran utilitas seperti listrik dan air, serta kebutuhan operasional lainnya. Harapannya melalui BOSP, satuan pendidikan dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran, serta memastikan akses pendidikan yang merata bagi semua anak, tanpa terkecuali.

Tujuan utama dari pemberian dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Selain itu, BOSP juga bertujuan untuk memperluas akses pendidikan kepada seluruh masyarakat. Tujuan lainnya adalah meningkatkan pemerataan mutu pendidikan di berbagai daerah di seluruh Indonesia (Halim, 2018).

Data terkait penggunaan dan alokasi dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) memiliki peran yang sangat vital dalam memastikan pencapaian tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Informasi yang terkandung dalam data tersebut menjadi landasan untuk mengevaluasi sejauh mana dana BOSP telah digunakan secara efektif dan efisien di berbagai satuan pendidikan. Melalui analisis data, dapat diidentifikasi pola-pola pengeluaran dana, sejauh mana kebutuhan pendidikan telah terpenuhi, dan apakah terdapat kecenderungan peningkatan atau penurunan efektivitas penggunaan dana. Selain itu, data juga memungkinkan untuk membandingkan kinerja pengelolaan dana BOSP antara satu sekolah dengan sekolah lainnya, sehingga dapat ditemukan *best practice* yang dapat diterapkan di tempat lain. Dengan demikian, data penggunaan dan alokasi dana BOSP menjadi instrumen penting dalam pembuatan keputusan dan perbaikan kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pendidikan di tingkat sekolah.

Data menunjukkan bahwa penyaluran Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di DKI Jakarta mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mendukung sektor pendidikan di wilayah tersebut. Bertambahnya alokasi dana BOSP ini tentunya bertujuan untuk memperkuat infrastruktur pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta memperluas akses pendidikan bagi masyarakat DKI Jakarta. Tujuan lainnya adalah untuk mengatasi disparitas dan kesenjangan dalam mutu pendidikan antara sekolah-sekolah di wilayah tersebut. Melalui peningkatan penyaluran dana BOSP, diharapkan mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kemajuan pendidikan di DKI Jakarta secara keseluruhan.



Gambar 1. Penyaluran BOSP di Provinsi DKI Jakarta

Namun meskipun tujuan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sangat mulia, masalah transparansi dalam pengelolaannya seringkali menjadi permasalahan yang dihadapi. Kurangnya transparansi dalam penggunaan dana BOSP dapat mengakibatkan penyalahgunaan atau penyelewengan dana, yang pada akhirnya merugikan proses pendidikan dan masyarakat secara luas.

Penelitian terdahulu oleh Sudarsono dan Junaedi (2017) menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) memiliki dampak positif terhadap kepercayaan masyarakat dan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah negeri. Studi ini menemukan bahwa sekolah-sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip transparansi, seperti penyusunan laporan keuangan yang terbuka dan akuntabel serta melibatkan komite sekolah dalam pengawasan penggunaan dana, cenderung lebih dipercaya oleh masyarakat dan orang tua murid. Hal ini berdampak pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa.

Penelitian lain oleh Rahman dan Wahyudi (2019) juga mengungkapkan bahwa transparansi dana BOSP berperan penting dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan dana di tingkat sekolah. Melalui pendekatan studi kasus di beberapa sekolah dasar di Indonesia, penelitian ini mengidentifikasi bahwa kurangnya transparansi seringkali menjadi penyebab utama terjadinya penyelewengan dana BOSP. Rahman dan Wahyudi menyarankan adanya sistem monitoring yang lebih ketat dan penggunaan teknologi informasi untuk mempublikasikan laporan keuangan secara real-time, yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi risiko korupsi dalam pengelolaan dana BOSP.

SMP Negeri 230 Jakarta menjadi objek penelitian yang relevan dalam konteks transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Sebagai salah satu lembaga pendidikan di Jakarta, SMP Negeri 230 memiliki peran penting dalam memastikan bahwa dana BOSP yang

diterimanya digunakan secara tepat sasaran dan transparan. Oleh karena itu, penelitian mengenai transparansi pengelolaan dana BOSP di SMP Negeri 230 Jakarta menjadi relevan untuk dilakukan guna memperbaiki sistem pengelolaan dana tersebut.

Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SMP Negeri 230 Jakarta?
2. Bagaimana upaya-upaya atau mekanisme yang dapat diterapkan untuk meningkatkan tingkat transparansi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SMP Negeri 230 Jakarta?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi mekanisme transparansi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SMP Negeri 230 Jakarta serta untuk mengidentifikasi upaya-upaya atau mekanisme yang dapat diterapkan guna meningkatkan tingkat transparansi dalam pengelolaan dana tersebut. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses pengelolaan dana BOSP di SMP Negeri 230 Jakarta serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan dana BOSP dalam mendukung kualitas pendidikan di sekolah tersebut.

2. LANDASAN TEORI

Pengelolaan Keuangan Sekolah

Pengelolaan keuangan sebenarnya telah dilakukan dengan sangat baik di seluruh sekolah, hanya

saja kadar dari substansi pelaksanaannya sendiri yang beragam antara satu sekolah dengan sekolah lainnya (Rekasari, 2020).

Pengelolaan keuangan sekolah menjadi elemen kunci dalam menjaga keseimbangan antara pendanaan dan kebutuhan operasional pendidikan. Berbagai teori keuangan memberikan landasan untuk memahami prinsip-prinsip yang terlibat dalam pengelolaan dana di lembaga pendidikan (Rahayu, 2019). Teori keuangan yang relevan dalam konteks pengelolaan keuangan sekolah mencakup prinsip-prinsip dasar manajemen keuangan, seperti prinsip kehati-hatian, prinsip kemandirian, dan prinsip akuntabilitas. Prinsip kehati-hatian menekankan pentingnya merencanakan dan mengelola dana sekolah dengan bijaksana, menghindari risiko yang tidak perlu, dan memastikan keberlanjutan keuangan jangka panjang. Prinsip kemandirian mengacu pada kemampuan sekolah untuk menghasilkan dan mengelola pendapatan serta dana yang diperolehnya secara efisien dan efektif. Sementara itu, prinsip akuntabilitas menekankan pentingnya transparansi, integritas, dan pertanggungjawaban dalam mengelola dana sekolah, sehingga memastikan bahwa penggunaan dana tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan dan kepentingan masyarakat.

Selain itu, konsep tata kelola keuangan yang baik juga menjadi fokus dalam kajian teori pengelolaan keuangan sekolah. Tata kelola keuangan yang baik mencakup proses pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta penerapan praktik-praktik pengelolaan risiko yang efektif (Suyati, 2020). Prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik juga melibatkan pembangunan sistem pengendalian internal yang kuat, pengawasan yang efisien, dan pelaporan

yang berkualitas.

Dengan menerapkan konsep-konsep ini, pengelolaan keuangan sekolah dapat menjadi lebih profesional, terpercaya, dan berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, kajian teori tentang pengelolaan keuangan sekolah memberikan landasan yang penting dalam pengembangan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang berkelanjutan dan berdaya guna di sekolah-sekolah.

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) merupakan dana yang disediakan oleh pemerintah untuk mendukung operasional sekolah dalam menjalankan kegiatan pendidikan. Dana ini diperuntukkan bagi semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga menengah, dan bertujuan untuk memfasilitasi berbagai kebutuhan sekolah, seperti pembelian buku, peralatan belajar mengajar, pembayaran listrik, air, serta kebutuhan operasional lainnya. Dengan demikian, dana BOSP berperan penting dalam memastikan kelancaran proses pendidikan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

Tujuan utama dari pemberian dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) adalah meningkatkan akses dan mutu pendidikan di Indonesia. Melalui dana BOSP, diharapkan sekolah dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, memperluas akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, serta mengurangi disparitas antara sekolah-sekolah yang berada di daerah perkotaan dan pedesaan. Selain itu, dana BOSP juga bertujuan untuk meningkatkan pemerataan mutu pendidikan di berbagai daerah, sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk

mendapatkan pendidikan berkualitas, hal ini dikarenakan dana BOSP berperan dalam peningkatan mutu pemerataan akses dari layanan Pendidikan itu sendiri (Perdana, 2021).

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bagi pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) antara lain adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur prinsip-prinsip dasar pendidikan, termasuk pengelolaan dana pendidikan, termasuk pengelolaan dana pendidikan. Selain itu, terdapat juga Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang memberikan arahan lebih rinci terkait dengan penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOSP. Melalui kedua peraturan ini, pemerintah memberikan pedoman yang jelas bagi penyelenggaraan dan pengelolaan dana BOSP di sekolah-sekolah di Indonesia.

Transparansi dalam BOSP

Badan Perencanaan Nasional mendefinisikan transparansi sebagai sebuah prinsip yang menjamin adanya akses bagi tiap manusia untuk mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, yaitu mengenai kebijakan, adanya proses pembuatan dan juga pelaksanaan terhadap rencana tersebut (Rakhmawati, 2018). Pasaribu (2011) dalam Dito (Sains, 2018) menjelaskan bahwa transparansi dibangun atas dasar yaitu kebebasan dalam memperoleh berbagai informasi yang akan dibutuhkan oleh para masyarakat.

Transparansi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) merupakan prinsip yang sangat penting untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik (Ningsih, Puspitasari, & Romdhoni,

2022) . Dengan transparansi yang memadai, pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana BOSP, seperti pihak sekolah, guru, orang tua murid, dan masyarakat umum, dapat memahami dengan jelas bagaimana dana tersebut digunakan dan untuk kepentingan apa. Transparansi ini mencakup aspek pengungkapan informasi secara jelas dan terbuka mengenai alokasi dana, penggunaan dana, serta hasil dan dampak dari penggunaan dana BOSP tersebut.

Keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) juga merupakan upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan dana. Dengan mempublikasikan informasi secara transparan, potensi untuk adanya praktik-praktik korupsi atau penyalahgunaan dana dapat diminimalkan. Selain itu, transparansi juga memungkinkan adanya pengawasan dan kontrol yang lebih efektif dari berbagai pihak, sehingga pelaksanaan pengelolaan dana BOSP dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tujuan yang telah ditetapkan.

Tingkat transparansi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dapat menjadi indikator keberhasilan dan kredibilitas dari program pendidikan tersebut (Septiningrum, Sumtaky, & Zuhroh, 2023) . Sekolah yang menerapkan praktik transparansi yang baik cenderung lebih dipercaya oleh masyarakat dan pemerintah, sehingga memiliki potensi untuk mendapatkan dukungan lebih besar dalam mendapatkan alokasi dana tambahan atau dukungan lainnya. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana BOSP perlu terus ditingkatkan guna memastikan

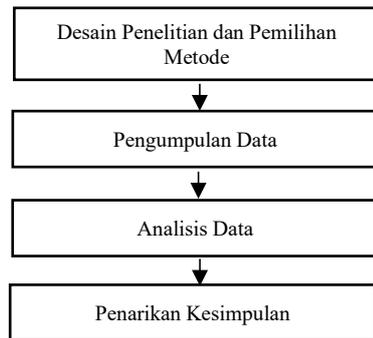
akuntabilitas yang lebih tinggi dan keberlanjutan program pendidikan yang dijalankan.

3. METODOLOGI

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mendalam untuk memahami secara holistik mengenai transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SMP Negeri 230 Jakarta. Desain penelitian ini akan melibatkan pengumpulan data secara langsung dari informan kunci yang terlibat dalam proses pengelolaan dana BOSP di sekolah tersebut. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang berbagai aspek yang mempengaruhi transparansi pengelolaan dana BOSP, termasuk proses pengambilan keputusan, mekanisme akuntabilitas, dan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan prinsip transparansi.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi praktik-praktik dan persepsi terkait transparansi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SMP Negeri 230 Jakarta. Penelitian akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat transparansi, baik dari perspektif internal maupun eksternal sekolah. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi proses pengelolaan dana BOSP serta dampaknya terhadap kualitas pendidikan di SMP Negeri 230 Jakarta. Berikut adalah bagan alir dari penelitian ini:





Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

Tahap awal dalam penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah utama terkait transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SMP Negeri 230 Jakarta. Peneliti melakukan observasi awal di lingkungan sekolah dan diskusi dengan 4 (empat) informan kunci, yaitu 2 (dua) guru SMP Negeri 230 Jakarta, 1 (satu) orang staf Tata Usaha dan 1 (satu) orang Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 230 Jakarta.

Selain itu, peneliti mengumpulkan data sekunder dari laporan keuangan sekolah dan kebijakan pemerintah terkait dana BOSP. Langkah ini diikuti dengan studi literatur yang mendalam untuk memahami konteks transparansi pengelolaan dana pendidikan, termasuk teori-teori yang relevan dan penelitian sebelumnya. Berdasarkan identifikasi masalah dan studi literatur, peneliti kemudian merumuskan tujuan penelitian dan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik untuk dijawab, seperti mengidentifikasi praktik transparansi yang diterapkan, hambatan yang dihadapi, serta persepsi berbagai pihak terkait pengelolaan dana BOSP.

Metode pengambilan data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi partisipatif akan

memungkinkan peneliti untuk secara langsung mengamati proses pengelolaan dana BOSP di sekolah, sementara wawancara mendalam akan memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mendapatkan perspektif yang mendalam dari berbagai pemangku kepentingan, seperti kepala sekolah, staf administrasi, guru, dan orang tua siswa. Studi dokumentasi akan melibatkan analisis dokumen-dokumen terkait pengelolaan dana BOSP, seperti laporan keuangan, pedoman penggunaan dana, dan kebijakan sekolah terkait.

Untuk menganalisis data, penelitian ini akan menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Data kualitatif yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi akan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan hubungan-hubungan yang muncul. Analisis akan dilakukan secara sistematis dan mendalam untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang transparansi pengelolaan dana BOSP di SMP Negeri 230 Jakarta.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterbukaan dalam pengelolaan dana BOSP mengacu pada penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai penggunaannya di sekolah, sehingga para pemangku kepentingan dapat memahaminya dengan baik. Pengelolaan dana BOSP memiliki prinsip yaitu fleksibel, efektif dan transparan. (Waluyo, Harsono, & Suyatmini, 2023) . Transparansi ini sangat penting untuk mendapatkan dukungan dari orang tua, pemerintah, dan masyarakat luas dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan antara mereka dengan komponen sekolah. Hubungan tersebut terjalin melalui penyediaan informasi dan

memastikan kelancaran kegiatan di sekolah.

Studi ini berfokus kepada salah satu sekolah menengah pertama di Jakarta, yaitu SMP Negeri 230 Jakarta. Hasil penelitian digambarkan sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SMP Negeri 230 Jakarta menunjukkan progres yang signifikan, tercermin dari berbagai indikator yang menandakan kesiapan sekolah dalam mengelola dana tersebut. Pertama, terdapatnya komite BOSP yang terbentuk dengan representasi yang cukup lengkap dari berbagai pihak terkait, seperti guru, orang tua siswa, dan staf administrasi sekolah, menunjukkan keseriusan dalam proses perencanaan. Kehadiran komite ini memastikan bahwa berbagai sudut pandang dan kepentingan dipertimbangkan secara adil dalam menyusun rencana penggunaan dana BOS.

Kedua, terdapatnya rencana kerja tahunan (RKT) yang disusun dengan cermat oleh komite BOSP menjadi bukti konkret bahwa perencanaan pengelolaan dana BOSP telah dipersiapkan secara terstruktur dan sistematis. RKT ini mencakup berbagai kegiatan dan program yang akan didanai melalui dana BOSP, serta target-target yang ingin dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. RKT yang komprehensif ini mencerminkan pemahaman yang mendalam akan kebutuhan sekolah serta visi dan misi pendidikan yang diemban oleh SMP Negeri 230 Jakarta.

Selain itu, partisipasi aktif dari para guru dalam proses perencanaan BOSP juga merupakan indikator positif bahwa tahap perencanaan telah berjalan

dengan baik. Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan kegiatan pembelajaran memiliki pemahaman yang mendalam akan kebutuhan-kebutuhan di lapangan, sehingga kontribusi mereka dalam menyusun rencana penggunaan dana BOSP menjadi sangat berharga. Terlibatnya para guru dalam proses perencanaan juga memastikan bahwa program-program yang didanai oleh dana BOSP relevan dengan kebutuhan pembelajaran di SMP Negeri 230 Jakarta.

Selanjutnya, terdapat mekanisme evaluasi dan revisi berkala terhadap rencana kerja tahunan (RKT) menunjukkan bahwa sekolah memiliki siklus perencanaan yang dinamis dan responsif terhadap perubahan kebutuhan dan kondisi. RKT dari kepala sekolah bersisi tim kerja yang didalamnya terdapat TPMPS yang terdiri dari pengawas, kepala sekolah, perwakilan dari para guru, perwakilan dari tenaga pendidik dan juga para komite (Kuswanto & Bharanti, 2021). Dengan melakukan evaluasi secara berkala, sekolah dapat mengidentifikasi keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program yang didanai melalui BOSP. Revisi yang dilakukan kemudian memungkinkan perbaikan dan penyesuaian terhadap RKT agar tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Terakhir, transparansi dalam penyampaian informasi mengenai rencana penggunaan dana BOSP kepada semua pihak terkait, termasuk orang tua siswa dan masyarakat, menegaskan bahwa tahap perencanaan BOSP di SMP Negeri 230 Jakarta telah berjalan dengan baik. Dengan memastikan keterbukaan dan kejelasan informasi, sekolah memungkinkan partisipasi aktif dari seluruh *stakeholders* dalam mengawasi dan mendukung pelaksanaan program-

program pendidikan yang didanai oleh dana BOSP. Hal ini menciptakan atmosfer kerja yang terbuka dan akuntabel, yang merupakan landasan penting dalam pengelolaan dana BOSP yang efektif dan efisien.

Penelitian terdahulu oleh Handayani (2018) menunjukkan bahwa tahap perencanaan yang transparan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sangat penting untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien. Handayani mengidentifikasi bahwa partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan orang tua, dalam proses perencanaan dana BOSP dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan terhadap pengelolaan dana tersebut. Studi ini juga menyoroti pentingnya penyusunan rencana anggaran yang rinci dan dipublikasikan secara terbuka untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana.

Penelitian lain oleh Putri dan Santoso (2020) juga mengungkapkan bahwa transparansi dalam tahap perencanaan dana BOSP berperan krusial dalam memastikan alokasi dana sesuai dengan kebutuhan prioritas sekolah. Dalam studi mereka, Putri dan Santoso menekankan bahwa keterlibatan semua pihak sejak awal perencanaan, termasuk dalam penetapan kebutuhan dan penyusunan anggaran, dapat mengurangi potensi konflik dan meningkatkan efektivitas penggunaan dana. Mereka juga merekomendasikan penggunaan teknologi informasi untuk mendokumentasikan dan menyebarluaskan rencana anggaran, yang dapat memudahkan pemantauan dan evaluasi oleh masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SMP Negeri 230 Jakarta telah mencapai tingkat kesuksesan yang luar biasa. Salah satu indikator keberhasilannya adalah ketersediaan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar. Gedung sekolah yang nyaman dan dilengkapi dengan fasilitas modern seperti laboratorium komputer, perpustakaan yang lengkap, serta ruang belajar yang bersih dan teratur menjadi bukti nyata bahwa bantuan operasional sekolah telah dikelola dengan baik.

Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan juga terlihat dari prestasi akademis siswa. Hasil ujian nasional dan berbagai kompetisi akademik lainnya menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan bahwa dana bantuan operasional sekolah telah dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 230 Jakarta.

Selanjutnya, partisipasi aktif dari seluruh komponen sekolah, mulai dari guru, siswa, hingga orang tua menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan bantuan operasional sekolah. Adanya koordinasi yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua siswa dalam memanfaatkan dana BOSP untuk kepentingan pendidikan menjadi landasan kuat dalam mencapai tujuan bersama.

Penerapan berbagai program ekstrakurikuler yang beragam juga menjadi bagian integral dari pelaksanaan dana BOSP di SMP Negeri 230 Jakarta. Melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti klub olahraga, seni, dan sains, siswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi diri mereka di luar jam pelajaran biasa. Hal ini tidak hanya meningkatkan

kualitas pendidikan, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian yang tangguh pada siswa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tahap pelaksanaan dana BOSP di SMP Negeri 230 Jakarta telah berjalan dengan sangat baik. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja sama yang erat antara semua pihak terkait serta pengelolaan dana yang transparan dan efektif.

Penelitian terdahulu oleh Wijaya dan Hartono (2018) menunjukkan bahwa transparansi dalam tahap pelaksanaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas penggunaan dana di sekolah. Studi ini menemukan bahwa seluruh sekolah yang menerapkan transparansi dengan cara mempublikasikan laporan keuangan secara rutin dan terbuka kepada semua pemangku kepentingan berhasil mengurangi potensi penyalahgunaan dana. Wijaya dan Hartono juga menekankan pentingnya pengawasan oleh komite sekolah dan masyarakat untuk memastikan bahwa dana BOSP digunakan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Penelitian lain oleh Lestari (2019) juga mengungkapkan bahwa penerapan transparansi dalam tahap pelaksanaan dana BOSP dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah negeri. Lestari mencatat bahwa keterbukaan dalam pengelolaan keuangan sekolah, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa, membantu menciptakan lingkungan yang lebih dipercaya oleh guru, siswa, dan orang tua. Hal ini tidak hanya meningkatkan partisipasi komunitas sekolah tetapi juga membantu memastikan bahwa setiap alokasi dana benar bermanfaat untuk peningkatan

kualitas pembelajaran dan fasilitas sekolah.

3. Tahap Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SMP Negeri 230 Jakarta dilakukan dengan sangat transparan dan akuntabel. Salah satu upaya untuk memastikan pertanggungjawaban yang baik adalah dengan menyusun laporan keuangan secara berkala yang mencakup penggunaan dana secara rinci. Laporan ini tidak hanya disampaikan kepada pihak terkait di dalam sekolah, tetapi juga kepada pihak-pihak eksternal seperti Dinas Pendidikan dan masyarakat umum.

Selain itu, adanya mekanisme pengawasan internal yang efektif juga menjadi bagian penting dalam tahap pertanggungjawaban. Penggunaan dana bantuan operasional sekolah diawasi oleh tim pengawas internal yang terdiri dari staf sekolah yang memiliki kompetensi dalam bidang keuangan dan akuntansi. Mereka melakukan pemeriksaan secara berkala untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan peraturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pertanggungjawaban dalam penggunaan dana bantuan operasional sekolah juga melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak terkait, termasuk guru, staf sekolah, dan komite sekolah. Mereka secara rutin melakukan evaluasi terhadap penggunaan dana dan memberikan masukan untuk perbaikan jika diperlukan. Hal ini menciptakan lingkungan yang terbuka dan transparan dalam mengelola dana bantuan operasional sekolah.

Selanjutnya, dalam tahap pertanggungjawaban juga dilakukan pelaporan kepada pihak donor atau

pemberi dana jika ada. Laporan ini berisi informasi mengenai penggunaan dana serta capaian-capaian yang telah dicapai dengan bantuan dana tersebut. Dengan demikian, pihak donor dapat memastikan bahwa dana yang mereka sumbangkan digunakan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Dengan melakukan tahap pertanggungjawaban secara komprehensif dan transparan, SMP Negeri 230 Jakarta menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Hal ini tidak hanya menciptakan kepercayaan dari pihak-pihak terkait, tetapi juga membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Penelitian terdahulu oleh Nugroho dan Wahyuni (2018) menunjukkan bahwa transparansi dalam tahap pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) memiliki dampak signifikan terhadap kepercayaan publik dan akuntabilitas sekolah. Studi mereka menemukan bahwa sekolah yang secara konsisten melaporkan penggunaan dana BOSP melalui mekanisme laporan berkala yang dipublikasikan dan mudah diakses oleh masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan orang tua dan pemangku kepentingan lainnya. Nugroho dan Wahyuni juga menyoroti pentingnya pelaporan yang detail dan jelas, yang mencakup semua aspek penggunaan dana, sehingga meminimalkan potensi penyelewengan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan sekolah.

Penelitian lain oleh Sari dan Prasetyo (2020) juga mengungkapkan bahwa transparansi dalam tahap pertanggungjawaban dana BOSP

berperan penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan berintegritas. Studi ini menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang melibatkan komite sekolah dan masyarakat dalam proses audit dan evaluasi penggunaan dana BOSP cenderung lebih berhasil dalam mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Sari dan Prasetyo menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan tidak hanya mendorong pengelolaan dana yang lebih baik, tetapi juga memperkuat hubungan antara sekolah dan komunitasnya, yang pada gilirannya mendukung peningkatan mutu pendidikan.

5. KESIMPULAN

Dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SMP Negeri 230 Jakarta, dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan dana tersebut telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang positif bagi keberlangsungan pendidikan di sekolah tersebut. Tahap perencanaan menunjukkan kematangan dalam menyusun rencana penggunaan dana yang terstruktur dan responsif terhadap kebutuhan sekolah, serta melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait. Pelaksanaan program-program BOSP dilakukan dengan efektif dan efisien, terbukti dari kelancaran penggunaan dana sesuai dengan rencana yang telah disusun, serta adanya kontrol dan monitoring yang berkelanjutan untuk memastikan pencapaian tujuan. Selain itu, tingkat pertanggungjawaban yang tinggi tercermin dari transparansi dalam penggunaan dana BOSP, dimana informasi mengenai alokasi dan penggunaan dana disampaikan secara terbuka kepada seluruh *stakeholders* sekolah.

Secara keseluruhan, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan kemudian pertanggungjawaban dana BOSP di SMP Negeri 230 Jakarta menunjukkan komitmen dan profesionalisme dalam mengelola dana tersebut untuk mendukung tercapainya visi dan misi pendidikan sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan bagi seluruh siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Apud. (2018). Manajemen Mutu Pendidikan Man Insan Cendekia. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 4(2), 171-190.
- Halim, A. (2018). *Mengelola bantuan operasional sekolah dengan baik*. Jakarta: Jakad Media Publishing.
- Handayani, S. (2018). Peran Transparansi dalam Tahap Perencanaan Dana BOS untuk Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Dana. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*, 12(1), 78-92.
- Hestina, N., & Melinda, D. (2022). Kebijakan Kontroversial Mengenai Dana Bos 2021. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan*, 25-29.
- Inkriwang, R. (2020). Kewajiban negara dalam penyediaan fasilitas pendidikan kepada masyarakat menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. *Lex Privatum*, 8(2).
- Kuswanto, Y., & Bharanti, B. (2021). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (Spmi) Di Sd Yppk Gembala Baik Kota Jayapura Provinsi Papua. *Jurnal Pengelolaan Pendidikan JUNI*, 2(1), 50-60.
- Lestari, M. (2019). Implementasi Transparansi dalam Pelaksanaan Dana BOS dan Dampaknya terhadap Kualitas Pendidikan. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Pendidikan*, 14(1), 45-58.
- Ningsih, S., Puspitasari, S., & Romdhoni, A. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Sekolah dan Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Terhadap Partisipasi Orang Tua Siswa. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(1).
- Nugroho, R., & Wahyuni, E. (2018). Dampak Transparansi dalam Pertanggungjawaban Dana BOS terhadap Kepercayaan Publik dan Akuntabilitas Sekolah. *Jurnal Akuntansi Pendidikan*, 12(3), 221-234.
- Perdana, N. (2021). IMPLEMENTASI MODEL KEPEMIMPINAN SITUASIONAL:KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR TENTANG RELAKSASI DANA BOS DAN DAMPAKNYA TERHADAP AKSESIBILITAS PENDIDIKAN. *DE JOURNAL (Dharmas Education Journal)*, 2(2), 337-348.
- Putri, A., & Santoso, D. (2020). Transparansi Tahap Perencanaan Dana BOS dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 18(3), 203-218.
- Rahayu, S. (2019). Praktik Pengawasan Pengelolaan Keuangan Sekolah. *JAKU (Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja)(E-Journal)*, 4(1), 15-23.
- Rakhmawati, I. (2018). pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan

- Operasional Sekolah (BOS) Dengan Partisipasi Stakeholder Sebagai Variabel Moderasi. *AKSTAR : Jurnal Akuntansi Syariah*.
- Rahman, A., & Wahyudi, R. (2019). Peran Transparansi dalam Pencegahan Korupsi Dana BOS di Sekolah Dasar. *Jurnal Akuntabilitas Keuangan Publik*, 10(1), 45-59.
- Rekasari, M. (2020). EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH (Study Evaluatif Di SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan). *JURNAL MANAJER PENDIDIKAN*, 14(2), 83-91.
- Rubiyati, W., & Ismanto, B. (2020). Evaluasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 6(2), 220-229.
- Sains, S. (2018). Sains, F. S. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. The New Fraud Triangle Model Dengan Perspektif Syariah Dalam Mendeteksi Perilaku Fraud.”. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4(1), 21-46.
- Sari, D., & Prasetyo, H. (2020). Peran Transparansi dalam Tahap Pertanggungjawaban Dana BOS dan Implikasinya terhadap Mutu Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia*, 15(2), 157-169.
- Sudarsono, & Junaedi. (2017). Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Masyarakat. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 15(2), 123-135.
- Septiningrum, A., Sumtaky, M., & Zuhroh, D. (2023). Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 10(1), 92-102.
- Suyati, S. (2020). Tata Kelola Keuangan Sekolah. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 10(1), 64-75.
- Waluyo, T., Harsono, & Suyatmini. (2023). Transparansi Penggunaan Dana Bos di Sekolah Dasar Islam Terpadu Muhammadiyah. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 28-37.
- Wijaya, A., & Hartono, D. (2018). Pengaruh Transparansi dalam Pelaksanaan Dana BOS terhadap Efisiensi Penggunaan Dana di Sekolah. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 16(2), 111-124.